



BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

Tabel 148. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	Meningkatnya APK PAUD provinsi	Pengembangan sarana dan prasarana	Mengembangkan sarana prasarana PAUD melalui program pendidikan PAUD berupa penambahan ruang kelas baru serta sarana penunjangnya
		Menetapkan jumlah tenaga pendidik yang berkompeten	Menetapkan jumlah kebutuhan tenaga pendidik PAUD melalui program pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik
	Meningkatnya APM SD/ sederajat	Pengembangan sarana dan prasarana	Mengembangkan sarana prasarana SD melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berupa penambahan RKB dan ruang Penunjang dan rehabilitasi ruang kelas serta sarana penunjangnya
	Meningkatnya APM SMP/ sederajat	Pengembangan sarana dan prasarana	Mengembangkan sarana prasarana SMP melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berupa penambahan RKB dan ruang Penunjang dan rehabilitasi ruang kelas serta sarana penunjangnya
	Meningkatnya APK SMA / sederajat	Penyediaan sarana dan prasarana	Membangun dan meningkatkan sarana prasarana SMA dan SMK melalui Program Pendidikan Menengah berupa pembangunan/ pengembangan unit sekolah, ruang kelas baru, gedung laboratorium, ruang praktek serta sarana penunjangnya
		Menetapkan jumlah kebutuhan guru SMK yang berkompeten melalui pengawasan terhadap distribusi	Menetapkan jumlah kebutuhan guru SMK melalui program pengawasan terhadap distribusi
	Menurunnya angka buta aksara	Penyediaan sarana dan prasarana	Membangun dan meningkatkan sarana prasarana melalui program Pendidikan Non Formal
		Menetapkan jumlah tenaga pendidik yang berkompeten	Menetapkan jumlah kebutuhan tenaga pendidik melalui program pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik
	Meningkatnya pelayanan pendidikan layanan khusus	Menyediakan sarana dan prasarana	Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana melalui Program Pendidikan Luar Biasa
	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Menyediakan sarana dan prasarana	Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui program pengembangan budaya baca



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan pembinaan perpustakaan
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Luar Biasa, Pendidik/Tenaga Kependidikan, dan manajemen pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Luar Biasa, Pendidik/Tenaga kependidikan, dan manajemen pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui program PAUD, Wajar Dikdas 9 Tahun, Dikmen, PNF, PLB, PMPTK dan Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Meningkatnya rasio kesetaraan gender	Mendorong pengarusutamaan gender	Mendorong pengarusutamaan gender melalui program pengarusutamaan gender dan anak
	Meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah ke perguruan tinggi	Penyediaan dana subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi	Menyiapkan biaya pendidikan melalui Program Cerdas Sultraku
Mewujudkan penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif	Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai	Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistem pengadaan secara efektif dan efisien
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di bidang perpustakaan dan kearsipan	Meningkatnya sumber daya aparatur perpustakaan dan arsip melalui pendidikan dan pelatihan	Mengikutsertakan aparatur dalam berbagai pendidikan baik formal maupun non formal	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan SDM bidang perpustakaan dan kearsipan daerah
Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Melaksanakan operasional jaringan otomasi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan kab/kota	Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan perpustakaan kab/kota, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan kecamatan, perpustakaan rumah ibadah dan perpustakaan lain yang berada di wilayah kab/kota untuk mengembangkan layanan perpustakaan	Melaksanakan pengadaan/pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan bahan perpustakaan dan arsip daerah
Sistem administrasi kearsipan yang baik	Tersedia Informasi kearsipan	Badan perpustakaan dan arsip merupakan wadah penyimpanan arsip nasional dan daerah yang diatur menurut UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
Tersedianya depo penyimpanan arsip	Terpeliharanya arsip sebagai simpul pemersatu daerah		

6.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

Tabel 149. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran secara efektif	Terlaksananya tata kelola administrasi perkantoran secara efektif	Melakukan penatakelolaan administrasi perkantoran secara efektif	Penatakelolaan administrasi perkantoran melalui perencanaan dan evaluasi, pengembangan kajian dan hukum kesehatan, pengembangan sistem informasi, penyediaan gaji pegawai, pengembangan kelembagaan laboratorium dan Bapelkes, pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana aparatur,



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya angka kematian ibu dan anak	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak
	Menurunkan angka kesakitan	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peran serta masyarakat	Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan Meningkatkan upaya kuratif dan rehabilitatif melalui pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, penyediaan obat dan vaksin serta perbekalan farmasi, peningkatan upaya pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit
	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi masyarakat	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kekurangan gizi
Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi di daerah sulit dan terpencil serta fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan jumlah, mutu dan distribusi sumberdaya manusia kesehatan	Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari daerah sulit dan terpencil serta difasilitasi pelayanan kesehatan melalui pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas dan jaringannya), peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (rumah sakit)
Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu	Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan terjangkau seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara	Pengembangan jaminan kesehatan melalui perluasan program pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya

6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 150. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan PUG	Meningkatnya pelaksanaan PUG dalam semua bidang pembangunan	Mengembangkan pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan PUG	Mengembangkan pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan PUG melalui peningkatan peran serta dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kesetaraan gender dalam pembangunan
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua bidang pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan yang berkualitas dalam semua bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (perempuan) melalui peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan se-Sulawesi Tenggara
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya kesadaran stakeholder untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pemahaman pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemenuhan dan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Meningkatkan pemahaman pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemenuhan dan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui
	Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga/ organisasi sosial masyarakat pemerhati perempuan dan anak	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga/ organisasi masyarakat pemerhati perempuan, anak dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia utamanya perempuan dalam semua bidang pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan anak melalui keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Meningkatkan pemahaman PPRG pemerintah dan ketersediaan anggaran yang responsif gender	Meningkatnya pemahaman PPRG perencana pemerintah dan focal point PUG di SKPD dan ketersediaan anggaran yang responsif gender	Meningkatkan pemahaman PPRG perencana SKPD dan focal point PUG SKPD Provinsi dan Kab/kota	Meningkatkan Pemahaman PPRG perencana SKPD dan focal point PUG SKPD Prov dan. Kab/kota melalui peningkatan pemahaman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
Meningkatkan ketersediaan data terpilah gender di semua bidang pembangunan	Tersedianya data kinerja ttg pelaksanaan PUG, pemenuhan pelaksanaan PUG, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Meningkatkan ketersediaan data terpilah semua bidang pembangunan	Meningkatkan ketersediaan data terpilah semua bidang pembangunan melalui pengembangan sistem informasi gender dan anak di SKPD dan lembaga terkait di provinsi, kabupaten/kota
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
		Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Meningkatkan kualitas SDM aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur
		Meningkatkan capaian kinerja SKPD	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan

6.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Keluarga Berencana

Tabel 151. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemahaman dan komitmen masyarakat untuk berwawasan kependudukan dan program KB	Meningkatnya pemahaman stakeholder untuk berwawasan kependudukan dan program KB	Meningkatkan Komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan meningkatkan kesejahteraan keluarga	dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat untuk berwawasan Kependudukan melalui Pendekatan (KIE), penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS dan pelayanan KB bagi masyarakat miskin

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

6.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pertanian

Tabel 152. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana serta sumberdaya aparatur	Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur
		Pembangunan yang bertumpu pada manusia (<i>People Centered Development</i>)	Peningkatan kemampuan/kualitas sumberdaya manusia pertanian
Meningkatkan ketahanan pangan	Terwujudnya peningkatan infrastruktur pertanian serta optimalnya pemanfaatan lahan	Revitalisasi infrastruktur dan sarana, teknologi dan industri hilir kelembagaan petani dan pembiayaan	Peningkatan pengembangan infrastruktur pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan dalam mendukung ketahanan pangan
Pengembangan sistem pemasaran hasil produksi pertanian	Berkembangnya sistem akses pemasaran hasil produksi pertanian	Mempromosikan hasil-hasil komoditi tanaman pangan dan peternakan	Mengembangkan sistem akses pemasaran komoditas hasil pertanian
Meningkatkan penerapan teknologi pertanian	Meningkatnya akses penyerapan teknologi di tingkat usaha tani guna meningkatkan produktivitas pertanian	Mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya lahan dan air secara lestari	Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air secara lestari, dengan menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan, mendorong pola partisipatif, menggalang sinergi dan meningkatkan mutu koordinasi, pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian
Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan	Meningkatnya produksi petani dan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan	Rehabilitasi sumberdaya pertanian sebagai pemulihan kemampuan produktivitas sumberdaya pertanian baik sumberdaya alam maupun prasarana pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian sekaligus pendapatan pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi diversifikasi dan rehabilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan nilai tambah melalui penerapan teknologi pasca panen
Meningkatkan kuantitas dan kualitas benih dan bibit ternak dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta swasembada daging tahun 2013-2018	Meningkatkan pelayanan kesehatan ternak, pencegahan penyakit menular pada ternak, dan pengawasan pedagang ternak	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Ternak dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak
		Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan menjaga kelestarian populasi dalam mendukung Sultra sebagai sumber bibit sapi	Revitalisasi sistem pembibitan ternak, meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal,



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		nasional	dan memperkuat kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veteriner
		Membangun tempat-tempat pemasaran hasil produksi peternakan di tingkat desa/kecamatan/ kabupaten	Mengembangkan sistem pengelolaan hasil dan sistem akses pemasaran hasil peternakan
		Meningkatkan sistem penerapan teknologi peternakan tepat guna	Peningkatan penyebaran informasi dan rekayasa teknologi peternakan

6.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Tabel 153. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan produk Perkebunan dan Hortikultura yang bermutu	Meningkatnya produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan	Penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan melalui perluasan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, teknologi pembibitan, penggunaan sarana produksi secara tepat guna, optimalisasi lahan, pengendalian OPT dan sertifikasi lahan
		Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura	Penerapan budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan melalui perluasan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, teknologi pembibitan, penggunaan sarana produksi secara tepat guna, optimalisasi lahan, pengendalian OPT dan sertifikasi lahan
Meningkatkan nilai tambah daya saing, produk perkebunan dan hortikultura di pasar domestik maupun internasional	Meningkatnya nilai tambah, daya saing, produk perkebunan dan hortikultura di pasar domestik maupun internasional	Mendorong pengembangan usaha dan mutu untuk memperoleh nilai tambah dan daya saing yang berbasis industri	Mendorong minat investasi dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif
Meningkatkan dan memantapkan kemandirian kelembagaan petani	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani serta bertambahnya jumlah lembaga petani (LEM Sejahtera)	Revitalisasi kelembagaan petani dan pembiayaan petani	Melanjutkan dan memantapkan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, antara lain : LEM Sejahtera
Meningkatkan kemampuan petani dan petugas perkebunan dan hortikultura	Meningkatnya kemampuan petani dan petugas perkebunan dan hortikultura	Meningkatkan SDM perkebunan yang inovatif dan kreatif serta mandiri	Pembangunan kawasan komoditi unggulan terpadu pada kawasan strategis
Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan	Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura	Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>public good</i> melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur seperti : pembangunan jalan produksi dan jalan desa
Mewujudkan penyediaan sarana /prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif	Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	Pengembangan sarana prasarana pendukung secara mandiri	Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistem pengadaan secara efektif dan efisien



6.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kehutanan

Tabel 154. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan kawasan hutan	Terlaksananya penatagunaan kawasan hutan	Melaksanakan padu serasi kawasan hutan	Melaksanakan padu serasi kawasan hutan melalui perencanaan makro, pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan
		Melaksanakan penataan organisasi pengelolaan kawasan hutan	Melaksanakan penataan organisasi pengelolaan kawasan hutan melalui fasilitasi pembentukan lembaga kehutanan
	Terlaksananya penggunaan kawasan sesuai dengan peruntukannya	Memberikan kepastian penggunaan kawasan hutan	Memberikan kepastian penggunaan kawasan hutan melalui perizinan, rekomendasi, pertimbangan teknis dan evaluasi
Mengembalikan kondisi dan daya dukung kawasan hutan	Terpeliharanya kondisi dan daya dukung kawasan hutan	Rehabilitasi hutan dan lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan melalui reboisasi, reklamasi, restorasi dan penghijauan
Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan	Meningkatnya pemanfaatan , hasil hutan kayu dan non kayu	Revitalisasi sistem pelayanan perizinan	Revitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, debirokratisasi, transparansi mekanisme dan biaya
		Sertifikasi hasil hutan dan turunanya	Mengembangkan sertifikasi hasil hutan dan turunanya melalui pengelolaan hutan produksi lestari
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara lestari	Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan	Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui pengembangan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan desa
	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan	Pelestarian, pengembangan dan promosi potensi jasa lingkungan kawasan hutan	Pelestarian, pengembangan dan promosi potensi jasa lingkungan melalui identifikasi, inventarisasi dan sosialisasi potensi kawasan hutan
Menurunkan konflik dan tekanan terhadap kawasan hutan	Terjaganya fungsi dan perlindungan kawasan hutan	Penegakan hukum secara konsisten	Penegakan hukum secara konsisten melalui pengamanan dan perlindungan kawasan hutan

6.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Energi

Tabel 155. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Energi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengurangi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan energi	Berkurangnya kesenjangan antara permintaan dan penyediaan energi	Meningkatkan supply energi	Meningkatkan supply energi melalui kajian kebutuhan energi
		Memperbaiki sistem distribusi energi	Memperbaiki distribusi melalui pembinaan dan pengawasan bidang minyak dan gas bumi
		Meningkatkan gerakan hemat energi	Meningkatkan gerakan hemat energi melalui sosialisasi dan konversi minyak ke gas elpiji
Optimalisasi pemanfaatan energi alternatif	Meningkatnya pemanfaatan potensi energi alternatif	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan



			melalui pengembangan energi baru dan terbarukan
Infrastruktur energi terutama sektor kelistrikan terpenuhi	Meningkatnya infrastruktur energi sektor kelistrikan	Membangun infrastruktur kelistrikan	Membangun infrastruktur kelistrikan melalui pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan transmisi.

6.2.5. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pertambangan

Tabel 156. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pertambangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan pendapatan daerah bidang energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah bidang energi dan sumber daya mineral	Menciptakan iklim yang baik bagi investasi bidang energi dan sumber daya mineral	Menciptakan iklim yang baik bagi investasi bidang sumber daya mineral melalui pengawasan dan pembinaan perusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral
Pengelolaan potensi sumberdaya mineral	Tersedianya data potensi sumber daya mineral	Mendukung penelitian dan pengembangan potensi sumber daya mineral	Mendukung penelitian dan pengembangan potensi sumberdaya mineral melalui penyebarluasan data dan informasi potensi sumber daya mineral serta pengembangan industri pengolahan
Peningkatan multiplier effect pembangunan daerah dan ekonomi masyarakat	Terwujudnya pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan potensi ESDM	Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan potensi ESDM melalui pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha pertambangan rakyat
		Mendukung penelitian dan pengembangan bidang energi dan sumber daya mineral	Mendukung penelitian dan pengembangan bidang energi dan sumber daya mineral melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar potensi sumberdaya mineral
Peningkatan kerjasama antar sektor	Terbangunnya kerjasama antar sektor	Kerjasama antar sector dalam hal pengembangan infrastruktur dasar wilayah	Kerjasama antar sektor dalam hal pengembangan infrastruktur dasar wilayah melalui koordinasi antar sektor di bidang pertambangan

6.2.6. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 157. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kenagakerjaan dan Ketrammigrasian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing	Meningkatnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan fungsi dan revitalisasi lembaga pelatihan	Penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan produktif melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan
Memfasilitasi penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan lapangan kerja yang layak dan produktif	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Pengembangan kualitas dan sistem informasi pasar kerja, bursa kerja, dan sistem perluasan kesempatan kerja	Peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara
Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan	Membangun hubungan industrial yang harmonis serta	Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial	meningkatnya peran kelembagaan industrial	peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh	pemberi kerja melalui penyelesaian perselisihan secara bipartit serta peningkatan kepesertaan Jaminan sosial pekerja/buruh
Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak dan profesional	Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja	Penambahan kapasitas aparat pengawasan ketenagakerjaan, baik kuantitas maupun kualitas	Peningkatan intensitas dan kualitas melalui pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum
Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak	Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha yang layak	Pembangunan permukiman transmigrasi baru pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal	Pembangunan permukiman transmigrasi baru pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk pengembangan kawasan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi
Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi menuju kemandirian sebagai pusat pertumbuhan baru	Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan kapasitas menuju kemandirian
Mewujudkan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif serta penyediaan data dan informasi	Terselenggaranya tata kelola administrasi dan manajemen serta penyediaan data dan informasi	Melakukan tata kelola administrasi dan manajemen dengan dukungan sumber daya yang tersedia	Melakukan tata kelola administrasi dan manajemen melalui optimalisasi sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja tugas dan fungsi

6.2.7. Strategi dan Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Tabel 158. Strategi dan Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan	Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan melalui pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan
Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi dan revitalisasi lahan budidaya serta peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan
	Meningkatnya produksi benur/udang dan benih ikan	Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan balai benih perikanan	Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan balai benih perikanan melalui penyediaan induk unggul, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana, penerapan sertifikasi perbenihan serta penguatan kelembagaan UPR



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas, keamanan, nilai tambah dan daya saing produk hasil perikanan	Meningkatnya mutu dan ketersediaan hasil perikanan	Peningkatan mutu hasil perikanan	Peningkatan mutu hasil perikanan melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan
	Meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah dan penguatan pangsa pasar	Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan	Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan melalui penetapan industri perikanan terpadu dan pengembangan infrastruktur
Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan	Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui pelatihan, magang dan penguatan kelembagaan
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terlestarikan dan meningkat nilai ekonominya	Lestarnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	Pengelolaan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pengembangan rencana strategis pesisir dan pulau-pulau kecil dan penetapan kawasan konservasi laut daerah
	Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil	Pendayagunaan pulau-pulau kecil	Pendayagunaan pulau-pulau kecil melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar pulau-pulau kecil
Menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang perikanan	Terlaksananya usaha-usaha perikanan secara legal, transparan dan akuntabel	Pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi pengawasan masyarakat, operasi pengawasan secara reguler dan terpadu, serta peningkatan sarana prasarana pengawasan
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola administrasi dan dukungan manajemen pemerintahan yang baik	Terselenggaranya tata kelola administrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan pelayanan administrasi dan publik	Peningkatan pelayanan administrasi dan publik melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kinerja	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui capaian laporan kinerja dan keuangan serta pengembangan perencanaan pembangunan dan penganggaran

6.2.8. Strategi dan Arah Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 159. Strategi dan Arah Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan jumlah industri yang mengolah potensi sumber daya alam daerah	Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah yang mengolah SDA daerah menjadi aneka produk berkualitas dan berdaya saing baik pasar dalam maupun luar negeri	Melaksanakan inisiasi penumbuhan industri menengah baru yang mengolah sumberdaya alam daerah	Melaksanakan inisiasi penumbuhan industri menengah baru yang mengolah sumberdaya alam daerah melalui penyusunan rencana penumbuhan dan pengembangan, pengajuan anggaran, pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku	Meningkatnya keterampilan teknis dan manajemen para pelaku usaha industri kecil dan menengah di	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha IKM melalui diklat teknis dan manajemen usaha



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
IKM di daerah	daerah	usaha IKM	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha industri melalui penyuluhan, pendampingan, bimbingan teknis oleh tenaga fungsional penyuluh, fasilitator, TPL, dan konsultan diagnosis IKM (Shindanshi)
Meningkatkan kemampuan teknologi industri kecil dan menengah di daerah	Meningkatnya penggunaan teknologi mesin dan peralatan pada industri kecil dan menengah di daerah	Meningkatkan kemampuan teknologi industri	Meningkatkan kemampuan teknologi industri melalui bantuan mesin dan peralatan serta investasi swasta
			Meningkatkan kemampuan teknologi industri melalui penyebaran informasi teknologi
Meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah yang ada di daerah	Meningkatnya kualitas produk, kemasan, dan pemasaran produk industri kecil dan menengah di daerah	Meningkatkan kualitas produk industri	Meningkatkan kualitas produk industri melalui penerapan SNI, Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), PMT/GKM, ISO
			Meningkatkan daya saing produk industri melalui pengembangan label dan kemasan oleh Rumah Kemasan Dinas Perindag
			Meningkatkan pemasaran IKM melalui promosi dan pameran dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri
Peningkatan kemampuan industri kecil dan menengah di daerah	Meningkatnya informasi dan akses ke sumber-sumber permodalan serta bantuan permodalan yang diterima oleh industri kecil dan menengah.	Meningkatnya kemampuan permodalan IKM	Meningkatnya kemampuan permodalan IKM melalui fasilitasi bantuan permodalan
Meningkatkan jumlah industri skala besar yang ada di daerah	Tumbuhnya industri skala besar yang mengolah SDA daerah, utamanya industri hasil pertambangan, perkebunan, dan perikanan	Meningkatkan jumlah investasi industri skala besar di daerah	Meningkatkan jumlah investasi industri skala besar di daerah melalui peningkatan informasi peluang investasi di sektor industri skala besar melalui penyusunan profil peluang investasi, pengembangan database potensi komoditi, pameran investasi di dalam dan luar negeri, penyediaan kawasan industri
Meningkatkan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat pada tingkat harga yang wajar dan terjangkau	Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat	Penyediaan prasarana dan sarana perdagangan	Penyediaan prasarana dan sarana perdagangan melalui pembangunan pasar, penyediaan sarana pergudangan
Meningkatkan jumlah dan jenis komoditi serta negara tujuan ekspor	Meningkatkan jumlah dan jenis komoditi ekspor	Meningkatkan jumlah eksportir di daerah	Meningkatkan jumlah eksportir di daerah melalui pengembangan kapasitas pengusaha
		Meningkatkan jumlah produk komoditas ekspor	Meningkatkan jumlah produk komoditas ekspor melalui pengembangan jenis komoditas
	Meningkatkan jumlah negara tujuan ekspor	Peningkatan informasi pasar produk ekspor daerah	Meningkatkan informasi pasar produk ekspor daerah melalui media promosi dan pameran dalam negeri, negara tujuan ekspor potensial serta pameran internasional
Meningkatkan penerapan tertib ukur dan perlindungan konsumen	Meningkatnya penerapan tertib ukur	Peningkatan pengawasan barang dan jasa beredar	Peningkatan pengawasan barang dan jasa beredar melalui tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, monitoring, pengembangan laboratorium UPTD Metrologi, dan pengembangan kapasitas PPNS
	Meningkatnya perlindungan konsumen	Pengembangan pemahaman tentang perlindungan konsumen	Pengembangan pemahaman tentang perlindungan konsumen melalui sosialisasi, fasilitasi perlindungan konsumen



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Produk / komoditi yang diuji dan disertifikasi mutunya	Komoditi dan produk industri daerah yang diperdagangkan di dalam daerah, antar pulau, maupun ekspor diuji dan disertifikasi	Pengujian dan sertifikasi produk / komoditi	Pengujian dan sertifikasi produk / komoditi melalui optimalisasi peran dan fungsi UPTD BPSMB
Meningkatkan kualitas pada pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pada publik	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur penunjang kegiatan administrasi perkantoran	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan melalui penyediaan fasilitas, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

6.2.9. Strategi dan Arah Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 160. Strategi dan Arah Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya profesionalisme SDM parekraf	Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia parekraf	Peningkatan kualitas SDM parekraf
		Penerapan standar kompetensi dan standar usaha parekraf	
		Peningkatan kajian pengembangan kebijakan parekraf	
Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing	Meningkatnya diversifikasi destinasi pariwisata	Pengembangan daya tarik yang berbasis lingkungan	Peningkatan kualitas daerah tujuan wisata dan industri pariwisata yang berkelanjutan
		Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata	
		Penguatan kelembagaan Industri pariwisata	
	Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata yang berkualitas	Peningkatan promosi budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif	Penguatan sinergitas keterpaduan pemasaran dan promosi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha
		Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran pariwisata melalui pengembangan analisis kepariwisataan	
		Peningkatkan pelayanan informasi dan pencitraan	
Terwujudnya apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni pertunjukan	Pengembangan dan aktivasi ruang kreatif	Peningkatan kreativitas karya seni pertunjukan
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kerja dan unit usaha sektor ekonomi kreatif	Peningkatan kualitas daya saing produk ekraf	Peningkatan apresiasi, inovasi produk dan kemampuan kewirausahaan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta penyediaan data dan informasi untuk kebijakan/manajemen dan informasi publik	Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya data dan informasi untuk mendukung kebijakan	Melakukan tata kelola administrasi dan manajemen dengan dukungan sumberdaya yang tersedia	Melakukan tata kelola administrasi dan manajemen melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja tugas dan fungsi



6.2.10. Strategi dan Arah Kebijakan Lingkungan Hidup

Tabel 161. Strategi dan Arah Kebijakan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Terciptanya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam melalui pendidikan teknis dan sertifikasi
		Rekrutmen tenaga teknis bidang lingkungan hidup	Rekrutmen tenaga teknis bidang lingkungan hidup melalui seleksi berbasis kebutuhan dan kompetensi
Memantapkan kelembagaan pengelolaan sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam	Terciptanya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan koordinasi antara kelembagaan provinsi dan kabupaten / kota	Peningkatan koordinasi antara kelembagaan provinsi dan kabupaten / kota melalui pembinaan dan pengawasan
		Mengembangkan sistem pelayanan prima	Mengembangkan sistem pelayanan prima melalui debirokratisasi dan PTSP
Mengefektifkan serta mengintensifkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan melalui penetapan regulasi, mengembangkan Standar Operational Procedure (SOP), Kajian Lingkungan Hidup Strategis, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Pengelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Mengembangkan sistem pengendalian lingkungan hidup terkait dengan peningkatan nilai tambah sumberdaya alam melalui industrialisasi	Terciptanya sistem pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam dalam rangka terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aktivitas pembangunan	Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian dampak lingkungan hidup

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Revitalisasi Pemerintahan Daerah

Tabel 162 Strategi dan Arah Kebijakan Revitalisasi Pemerintahan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan secara optimal	Mengembangkan sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Mengembangkan sistem pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur melalui penyelenggaraan sistem pendidikan dan pelatihan yang terencana dengan baik
Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat serta sistem promosi dan rekrutmen pegawai.	Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai serta sistem promosi dan rekrutmen pegawai	Mengembangkan sistem intensif dan disinsentif terhadap disiplin dan kinerja PNS	Mengembangkan sistem intensif dan disinsentif terhadap disiplin dan kinerja PNS melalui pengembangan sistem penilaian yang terukur
		Mengembangkan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel	Mengembangkan sistem rekrutmen melalui seleksi sesuai kebutuhan dan standar kompetensi
		Mengembangkan promosi yang transparan dan akuntabel	Mengembangkan sistem promosi PNS melalui penilaian kinerja dan kompetensi
Terpenuhi sarana prasarana pemerintahan yang memadai	Tersedianya sarana prasarana pemerintahan yang memadai	Mengembangkan fasilitas sarana prasarana pemerintahan	Mengembangkan fasilitas sarana prasarana pemerintahan melalui pembangunan sarana dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengadaan fasilitas pendukung lainnya
Sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	Terwujudnya pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	Peningkatan kapasitas aparat	Peningkatan kapasitas aparat melalui pendidikan dan pelatihan
Pemantapan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan	Sinerginya koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan	Mengembangkan sistem koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan	Mengembangkan sistem koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan melalui peningkatan rapat koordinasi secara langsung dan sistem teleconference
Mewujudkan profesionalisme pengelola keuangan dan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis elektronik	Terwujudnya aparat pengelola keuangan yang profesional	Mengembangkan kapastitas dan kompetensi pengelola keuangan	Mengembangkan kapastitas dan kompetensi pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan
	Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik	Mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah	Mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah melalui pengembangan sarana prasarana teknologi informasi
Terselenggara unit layanan pengadaan barang dan jasa secara optimal	Berfungsinya unit layanan pengadaan barang dan jasa secara efektif	Mengembangkan sistem layanan ULP secara efektif	Mengembangkan sistem layanan ULP secara efektif melalui pengembangan regulasi, kapasitas pengelola ULP dan prasarananya
Terwujudnya pelayanan prima	Berfungsinya sistem pelayanan prima	Mengembangkan sistem layanan prima administrasi pemerintahan	Mengembangkan sistem layanan prima administrasi pemerintahan melalui pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
		Megembangkan prasarana pendukung pelayanan prima administrasi pemerintah	Megembangkan prasarana pendukung pelayanan prima administrasi pemerintah melalui pengadaan dan pengembangan sarana PTSP

6.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Administrasi Kegawain

Tabel 163. Strategi dan Arah Kebijakan Administrtasi Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat serta sistem promosi dan rekrutmen pegawai	Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai serta sistem promosi dan rekrutmen pegawai	Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif terhadap disiplin dan kinerja PNS	Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif terhadap disiplin dan kinerja PNS melalui pengembangan sistem penilaian yang terukur
		Mengembangkan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel	Mengembangkan sistem rekrutmen melalui seleksi sesuai kebutuhan dan standar kompetensi
		Mengembangkan promosi yang transparan dan akuntabel	Mengembangkan sistem promosi PNS melalui penilaian kinerja dan kompetensi kompetensi
Meningkatkan pelayanan kepegawaian yang optimal kepada masyarakat	Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang optimal	Mengembangkan sumberdaya manusia aparatur pengelola kepegawaian dan menciptakan budaya kerja yang baik	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengelola dan performance aparatur Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sultra
Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara transparan dan	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian terarah dan	Menciptakan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan penguatan	Menerapkan pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian yang optimal



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
akuntabel	optimal	kapasitas sumber daya manusia aparatur pengelola kepegawaian	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Tersedianya kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional	Penempatan, pengembangan dan pemberdayaan aparatur sesuai potensi dan kompetensi pegawai negeri sipil	Pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui diklat jabatan, fungsional dan teknis serta promosi jabatan struktural dan fungsional
Mewujudkan pegawai negeri sipil yang taat asas kepatuhan dan kepatutan serta profesional	Terwujudnya pegawai negeri sipil yang taat, handal dan profesional	Meningkatkan pembinaan dan pemahaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemberian sanksi dan reward kepada pegawai negeri sipil yang indiscipliner dan berprestasi
Mempercepat akses pelayanan kepegawaian melalui sistem informasi dan aplikasi pelayanan kepegawaian secara online	Tersedianya pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi secara online	Menjalin kemitraan dengan Telkom, SKPD provinsi, kabupaten/kota, BKN regional dan pusat	Pengembangan jaringan informasi kepegawaian berbasis teknologi secara online
Meningkatkan sarana dan prasarana untuk percepatan pelayanan kepegawaian secara efektif dan efisien	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kepegawaian	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kepegawaian	Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang percepatan pengelolaan pelayanan kepegawaian

6.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tabel 164. Strategi dan Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan desa/kelurahan yang efektif dan efisien	Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan	Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan
Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan	Meningkatnya ekonomi masyarakat desa/kelurahan	Meningkatkan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan pasar desa	Meningkatkan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan
		Meningkatkan kapasitas Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan pasar desa	Meningkatkan kapasitas lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa melalui pengembangan sarana prasarana ekonomi desa, sistem informasi manajemen BUMDes
Meningkatkan kapasitas pengelolaan kelembagaan desa/ kelurahan	Meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan desa/ kelurahan	Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan	Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan melalui penjurangan pendidikan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
		Peningkatan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan	Peningkatan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa/kelurahan
		Pengembangan regulasi kelembagaan desa/kelurahan	Pengembangan regulasi kelembagaan desa/kelurahan melalui fasilitasi pengembangan peraturan desa/kelurahan
Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Terciptanya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Mengintensifkan penerapan 10 Program Pokok PKK	Mengintensifkan penerapan 10 Program Pokok PKK melalui koordinasi ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kecamatan dan desa/kelurahan
		Peningkatan kapasitas SDM pengurus Tim Penggerak PKK di semua jenjang	Peningkatan kapasitas SDM pengurus Tim Penggerak PKK di semua jenjang melalui diklat dan pembinaan kader PKK
Melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya lokal	Teraktualisasinya nilai-nilai adat dan budaya lokal di masyarakat	Implementasi adat dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat	Implementasi adat dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, pengembangan pesta adat dan ritual budaya
		Penguatan lembaga adat	Penguatan lembaga adat melalui dukungan sarana prasarana lembaga adat
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta pengembangan inovasi teknologi tepat guna	Meningkatnya produktifitas dalam pengelolaan sumberdaya alam yang sustainable	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi melalui peningkatan sumberdaya manusia
	Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna di masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna melalui dukungan teknis dan pembiayaan serta pembinaan masyarakat
		Pengembangan inovasi teknologi tepat guna	Pengembangan inovasi teknologi tepat guna melalui pengkajian, alih teknologi dan promosi teknologi tepat guna
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	Terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran dan tersedianya sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien	Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung secara memadai	Pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa perkantoran secara efektif dan efisien

6.3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 165. Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tersedianya tenaga terampil pengelola keuangan dan aset	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pendidikan dan pelatihan	Menugaskan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional
Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset	Terciptanya pemahaman peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset	Bimbingan Teknis (Bintek), workshop	Menugaskan staf untuk mengikuti bintek dan workshop
Terciptanya pelayanan yang tepat waktu sesuai sistem dan prosedur	Terwujudnya disiplin anggaran pada setiap program dan kegiatan	Menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset	Besaran uang persediaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
			Ganti uang persediaan ditetapkan sebesar 75% dari penggunaan uang persediaan
	Tertib administrasi 3 tertib pengelolaan aset	Inventarisasi dan penilaian aset	Penerbitan SP2D paling lambat 2 hari kerja
			Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
		Penerbitan surat keterangan bebas aset bagi yang pegawai mutasi dan pensiun	
		Kerjasama dengan BPKP terkait dengan	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			inventarisasi aset Kerjasama dengan Diklat Kementerian Dalam Negeri
Terwujudnya raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang sinkron dengan prioritas dan program provinsi, nasional dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Penetapan perda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota tepat waktu	Pembinaan pada kabupaten/kota terhadap pengelolaan keuangan dan aset	APBD kab/kota disampaikan kepada gubernur paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota disampaikan kepada gubernur paling lambat bulan Agustus tahun berjalan Perubahan APBD disampaikan kepada gubernur paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
Tersedianya gedung kantor	Membangun gedung kantor, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyediaan anggaran belanja	Penyiapan lokasi dan side plan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terciptanya kenyamanan kerja	Penataan lingkungan kerja	
Merevitalisasi aset-aset daerah	Teridentifikasinya aset-aset daerah	Mendayagunakan aset-aset daerah secara maksimal	Mendayagunakan aset-aset daerah melalui sensus, pendataan dan administrasi aset daerah

6.3.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Tabel 166. Strategi dan Arah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas aparat pengawas internal pemerintah daerah	Terwujudnya kompetensi aparat pengawas pemerintah daerah	Mengembangkan kompetensi aparat pengawas internal	Mengembangkan kompetensi aparat pengawas internal melalui pengembangan diklat dan bimbingan teknik
Mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan di tingkat SKPD secara transparan dan akuntabel serta tepat waktu	Mengembangkan sistem pemeriksaan secara komprehensif	Mengembangkan pemeriksaan secara komprehensif melalui pengembangan sistem audit secara berkala dan sidak
	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan aset yang baik di tingkat SKPD	Mengembangkan sistem pemeriksaan dan pengawasan aset	Mengembangkan sistem pemeriksaan dan pengawasan aset melalui sistem pendataan dan administrasi secara elektronik
	Terselenggaranya penyelesaian tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal)	Mengembangkan sistem peringatan terhadap hasil audit dan laporan masyarakat	Mengembangkan sistem peringatan terhadap hasil audit melalui pengembangan teknologi informatika dalam tindak lanjut hasil audit dan laporan masyarakat
Mewujudkan akuntabilitas kinerja SKPD	Meningkatnya kinerja SKPD	Mengembangkan sistem pembinaan dan pemantauan	Mengembangkan sistem pembinaan dan pemantauan melalui pengembangan sistem pemantauan secara elektronik
	Terwujudnya SAKIP yang efektif di SKPD		
Mewujudkan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota	Terwujudnya KORWASDA	Mengembangkan sistem koordinasi pengawasan antara pemerintah dan pemerintah daerah	Mengembangkan sistem koordinasi pengawasan antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui pengembangan sistem <i>on-line</i>
	Terlaksananya evaluasi LPPD	Mengembangkan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengembangkan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengembangan sistem koordinasi
Mewujudkan penyediaan sarana /prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif	Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai	Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistem pengadaan secara efektif dan efisien

6.3.5. Strategi dan Arah Kebijakan Penanganan Permasalahan Sosial

Tabel 167. Strategi dan Arah Kebijakan Penanganan Permasalahan Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesos (PMKS)	Aparat pelaksana layanan dan masyarakat penyandang masalah kesos	Mengembangkan kompetensi aparat petugas pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan dan perlindungan PMKS	Mengembangkan kompetensi aparat melalui pendidikan teknis pelayanan kesos
Mewujudkan pelaksanaan administrasi serta sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesos (PMKS)	Administrasi penunjang operasional pelayanan Kesos	Memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan adm penyandang masalah kesos dan potensi kesos	Meningkatkan kualitas layanan dengan melakukan tertib adm dan dukungan operasional yang efisien
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan kesos	Memelihara dan meningkatkan sarana pelayanan penyandang masalah kesos dan potensi kesos	Meningkatkan kualitas layanan dengan memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional teknis
	Terselenggaranya penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang baik di tingkat SKPD	Meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan capaian kinerja	Membuat laporan kinerja dan keuangan yang baik & akuntabel di tingkat SKPD
Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS	Meningkatnya pemberian bantuan sosial Bbgi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>1. Perluasan Jangkauan Meningkatkan dan memperluas jangkauan program meliputi jumlah, persebaran dan proporsi sasaran program, didukung oleh anggaran yang realistis</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Program Peningkatan kualitas program melalui standar program yang terukur untuk mencapai hasil "tuntas" mewujudkan kemandirian</p> <p>3. Advokasi Sosial Upaya memperjuangkan dukungan sosial dan politik kepada pengambil keputusan di pusat maupun daerah, termasuk lembaga legislatif sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial didukung terutama aspek landasan hukum dan pendanaan yang realistis berbagai pihak seluas mungkin</p> <p>4. Pendayagunaan Kerjasama dan Jaringan Penajaman program dan kegiatan yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dalam rangka optimalisasi sasaran secara efektif dan efisien</p>	<p>a) Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial</p> <p>b) Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p>
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sosial	Meningkatnya penyediaan sarana dan	Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung optimalisasi	Meningkatkan kualitas pemeliharaan, peningkatan dan



	prasarana panti sosial Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti	output, outcome dan impact	pengembangan sarana dan prasarana sosial
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penanggulangan Korban Bencana	Meningkatnya bantuan sosial bagi korban bencana Meningkatnya evakuasi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kampung siaga bencana • Kesiapsiagaan • Taruna siaga bencana • Promosi sosial • Profesionalitas • Penjangkauan • Koordinasi 	Menyediakan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial kepada kelompok rentan dan beresiko
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial	Meningkatnya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye sosial • Kemitraan sosial • Partisipasi sosial • Advokasi dan pendampingan sosial • Penyediaan akses sosial 	Peningkatan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi semua PMKS kelompok sasaran dan khususnya perlindungan sosial bagi kelompok sasaran penyandang masalah berat

6.3.6. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Tabel 168. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pembinaan esatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur politik dan suprastruktur politik	Meningkatnya kualitas infrastruktur politik dan suprastruktur politik	Struktur politik dan infrastruktur politik dan suprastruktur politik	Terlaksananya peningkatan kualitas infrastruktur politik dan suprastruktur politik
Menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	Terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	Ciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	Terlaksananya penciptaan stabilitas pemerintahan yang kondusif di daerah
Menguatkan nilai - nilai Ideologi negara dan wawasan kebangsaan	Menguatnya nilai - nilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan	Optimalkan penguatan nilai – nilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan	Terlaksananya penguatan nilai - nilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan
Meningkatkan kapasitas ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dalam memelihara kerukunan nasional	Meningkatnya kapasitas ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dalam memelihara kerukunan nasional	Tingkatkan kapasitas ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dalam memelihara kerukunan nasional	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dalam memelihara kerukunan nasional
Menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupanberbangsa dan bernegara	Terciptanya rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Ciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Terpeliharannya rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesbang dan politik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesbang dan politik dengan tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggarana pelaksanaa administrasi perkantoran seara efektif dan efisien	Tingkatkan kapasitas kelembagaan kesbang dan politik	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan kesbang dan politik dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai

6.3.7. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Penyiaran

Tabel 169. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Penyiaran

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Mewujudkan industri penyiaran lokal	Terwujudnya kualitas lembaga penyiaran	Meningkatkan pelayanan perizinan lembaga penyiaran	Meningkatkan pelayanan perizinan lembaga penyiaran melalui proses permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tepat waktu
Meningkatkan kualitas isi siaran	Terselenggaranya sistem pengawasan isi siaran pada	Meningkatkan sistem pengawasan isi siaran terhadap	Meningkatkan sistem pengawasan isi siaran



	lembaga penyiaran	siaran radio dan televisi	terhadap siaran radio dan televisi melalui pemantauan isi siaran radio dan televisi secara rutin
	Terwujudnya forum pemerhati isi siaran	Mengembangkan kerjasama pengawasan isi siaran di kab/Kota	Mengembangkan kerjasama pengawasan isi siaran di kab/kota melalui pembentukan forum pemerhati isi siaran dan sosialisasi dengan masyarakat
Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat kerja	Meningkatkan koordinasi bidang penyiaran dengan mitra kab/Kota	Meningkatkan koordinasi dengan mitra di kab/kota melalui rapat koordinasi dan rapat kerja
Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif	Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai	Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistem pengadaan secara efektif dan efisien

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan

Tabel 170. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai kearifan lokal dan budi pekerti bangsa	Tersosialisasinya nilai-nilai kearifan lokal dan budi pekerti bangsa	Menggali dan memperkenalkan kearifan lokal dan budi pekerti bangsa	Menggali kearifan lokal dan budi pekerti bangsa melalui kajian dan pengembangan <i>folklore</i>
			Memperkenalkan kearifan lokal dan budi pekerti bangsa melalui berbagai media massa, promosi, sayembara
Memperkaya keragaman budaya bangsa	Terdokumentasinya keragaman budaya asli daerah	Mengidentifikasi dan menemukan keragaman budaya asli daerah	Mengidentifikasi dan menemukan keragaman budaya asli daerah melalui pengelolaan keragaman budaya daerah
Peningkatan penggalian nilai-nilai seni dan situs budaya	Teraktualisasinya nilai-nilai seni dan situs budaya daerah	Penelusuran nilai-nilai seni dan situs budaya daerah	Menelusuri nilai-nilai seni budaya daerah melalui pengkajian dan dialog seni budaya
			Menelusuri situs budaya daerah melalui restorasi dan publikasi
Memperkuat karakter bangsa dan nilai-nilai nasionalisme penguatan dan peningkatan peran lembaga-lembaga adat	Terbangunnya karakter bangsa dan nasionalisme	Mengkaji dan mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa dan nasionalisme	Mengkaji dan mengintegrasikan karakter bangsa dan nasionalisme melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi serta penguatan lembaga adat



6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dasar, kewilayahan serta Kawasan Strategis

6.5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang

Tabel 171. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya tugas dan fungsi SKPD secara optimal	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Menyediakan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan barang dan jasa
		Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran melalui pengadaan dan pemeliharaan
		Meningkatkan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur melalui pemanfaatan mesin absensi dan penyediaan pakaian kerja
		Meningkatkan kualitas aparatur	Peningkatan kualitas aparatur melalui kursus dan pelatihan
		Meningkatkan sistem pelaporan	Peningkatan sistem pelaporan melalui penyusunan laporan tepat waktu
Meningkatkan kualitas perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan database infrastruktur	Menyediakan dokumen perencanaan lebih awal dengan database yang akurat	Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur melalui sinkronisasi dan penyediaan data base infrastruktur
Pengembangan kondisi ruas jalan dan jembatan	Meningkatnya akses jaringan jalan di Sulawesi Tenggara	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan baru dalam kawasan strategis dan lintas strategis	Pembangunan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan jalan dan jembatan baru (Jembatan Teluk Kendari, Pulau Muna-Pulau Buton)
	Meningkatnya kualitas jaringan jalan provinsi	Peningkatan kondisi jalan rusak dan sangat rusak	Peningkatan kondisi jalan melalui percepatan pengembangan dan pemeliharaan jalan pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis provinsi
		Peningkatan kondisi jembatan	Peningkatan kondisi jembatan melalui pemeliharaan, peningkatan kondisi jembatan
Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya air	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana sumberdaya air yang sudah ada	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa, sungai, pantai dan jaringan pengairan lainnya
	Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya air yang tersedia	Pembangunan sarana dan prasarana baru dalam pengelolaan sumberdaya air	Pembangunan sarana dan prasarana baru dalam pengelolaan sumberdaya air melalui pengembangan pengelolaan air baku dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Meningkatkan pengembangan sarana prasarana perkotaan dan perdesaan	Meningkatnya akses air minum masyarakat kawasan perkotaan dan perdesaan	Peningkatan penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan	Peningkatan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan
	Meningkatnya ketersediaan sistem air limbah untuk masyarakat di kawasan perkotaan dan perdesaan	Peningkatan pelayanan jaringan air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan	Pengembangan pelayanan jaringan air limbah melalui penyediaan sistem air limbah setempat dan sistem air limbah



	Meningkatnya ketersediaan fasilitas persampahan di kawasan perkotaan	Peningkatan pengelolaan fasilitas persampahan di kawasan perkotaan	terpusat Peningkatan pengelolaan fasilitas persampahan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah perkotaan
	Tersedianya sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan	Pengurangan luasan genangan di kawasan perkotaan	Pengurangan luasan genangan di kawasan perkotaan melalui penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Penataan kawasan permukiman di kawasan perkotaan	Penataan kawasan permukiman perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman
	Peningkatan kualitas gedung dan fasilitas umum sesuai standar dan kriteria	Peningkatan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan	Peningkatan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungannya melalui pembangunan gedung dan fasilitas umum
Meningkatkan kapasitas wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan kapasitas wilayah strategis dan cepat tumbuh melalui penyediaan infrastruktur wilayah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Penyelenggaraan jasa konstruksi memenuhi standar jasa konstruksi	Peningkatan tertib pengawasan, klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi	Mewujudkan jasa konstruksi yang profesional melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi
Meningkatkan pengembangan perumahan dan permukiman	Peningkatan jumlah penyediaan hunian perumahan	Meningkatkan kapasitas jumlah hunian perumahan	Meningkatkan kapasitas jumlah hunian melalui pembangunan perumahan swadaya dan formal dan perumahan khusus
	Peningkatan kualitas perumahan	Melaksanakan renovasi perumahan yang tidak layak huni	Renovasi perumahan yang tidak layak huni melalui bantuan stimulan
	Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Meningkatkan derajat kesehatan kawasan permukiman	Meningkatkan derajat kesehatan kawasan permukiman melalui penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya fungsi perencanaan ruang dan kawasan strategis	Percepatan penyelesaian dokumen tata ruang	Percepatan penyelesaian dokumen tata ruang melalui peningkatan koordinasi antar sektor dan wilayah, pengembangan sumberdaya manusia
		Penataan kawasan strategis	Penataan kawasan strategis melalui penyusunan rencana detail tata ruang
	Meningkatnya fungsi pemanfaatan ruang	Penataan kawasan lindung dan budidaya	Penataan kawasan lindung dan budidaya melalui koordinasi antar sektor dan wilayah
	Meningkatnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan sumberdaya manusia tata ruang	Peningkatan sumberdaya manusia tata ruang melalui pendidikan dan pelatihan
Peningkatan sistem pengawasan tata ruang		Peningkatan sistem pengawasan tata ruang melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi tata ruang	

6.5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Perhubungan

Tabel 172. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan rutin jasa perkantoran	Terselenggaranya pelayanan rutin perkantoran	Penyelenggaraan pelayanan rutin kantor	Penyelenggaraan pelayanan rutin kantor melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Pengembangan fasilitas sarana prasana aparatur Peningkatan disiplin aparatur Sistim pelaporan capaian kinerja Sistim perencanaan SKPD
Meningkatkan pelayanan dasar jasa transportasi	Terintegrasinya pelayanan dasar jasa transportasi	Mengembangkan sarana prasarana transportasi darat, laut, dan udara	Mengembangkan sarana prasarana transportasi darat melalui pengembangan fasilitas angkutan jalan dan angkutan penyeberangan Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut melalui pengembangan fasilitas angkutan laut Mengembangkan sarana prasarana transportasi udara melalui pengembangan fasilitas terminal bandar udara
	Tersedianya infrastruktur perhubungan pada kawasan strategis	Mengembangkan infrastruktur pada kawasan strategis	Mengembangkan infrastruktur pada kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis
Tersedianya sumberdaya manusia bidang perhubungan dalam kuantitas dan kualitas	Tersedianya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang perhubungan	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Peningkatan jumlah dan distribusi sumberdaya manusia	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pendidikan berjenjang, pendidikan teknis Peningkatan jumlah dan distribusi sumberdaya manusia melalui rekrutmen tenaga lapangan, pengembangan sistem penghargaan dan sanksi serta pengembangan sistem pengawasan
Menciptakan pelayanan prima bidang perhubungan	Tersedianya sistem pelayanan prima administrasi pemerintah bidang perhubungan Terciptanya sistem pelayanan prima jasa perhubungan	Mengintegrasikan pelayanan administrasi perizinan perhubungan ke dalam PTSP Mengembangkan regulasi standar pelayanan	Mengintegrasikan pelayanan administrasi perizinan perhubungan ke dalam PTSP melalui debirokratisasi dan koordinasi pelayanan Mengembangkan regulasi standar pelayanan melalui penetapan standar pelayanan angkutan, meningkatkan disiplin pelayanan pada fasilitas angkutan

6.5.3. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi

Tabel 173. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan Jasa komunikasi dan informatika	Terciptanya pelayanan komunikasi dan informatika yang baik	Mengembangkan sistem pengawasan terselenggaranya komunikasi dan informatika yang baik	Mengembangkan sistem pengawasan melalui pengembangan kapasitas aparatur dan sarana prasarana

6.5.4. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana

Tabel 174. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penanggulangan bencana	Meningkatkan kemampuan aparatur penanggulangan bencana	Peningkatan tehnik operasional dan manajerial kebencanaan melalui pendidikan pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian, penggunaan peralatan, logistik kebencanaan, telekomunikasi dan informasi
Peningkatan penguatan peran kelembagaan dalam mendukung penanggulangan bencana	Meningkatnya konsultasi supervisi dan kordinasi antar sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana	Peningkatan konsultasi, supervisi dan koordinasi lintas sektor dan wilayah	Peningkatan koordinasi lintas sektor dan wilayah pada saat sebelum bencana, pengembangan SOP, protap, perda kebencanaan, dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

			pembangunan Pusat Data dan Operasional (PUSDALOP) penanggulangan bencana, pengembangan SOP, protap, perda kebencanaan, dan pembangunan Pusat Data dan Operasional (PUSDALOP) penanggulangan bencana
Peningkatan sarana kedaruratan penanggulangan bencana	Tersedianya sarana kedaruratan penunjang penanggulangan kebencanaan	Meningkatkan keberfungsian peralatan kebencanaan, penggunaan pada saat tanggap darurat	Peralatan dan logistik kebencanaan melalui pengembangan perbengkelan dan rehabilitasi peralatan
Peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Meningkatkan kapabilitas pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat sebelum bencana	Pengembangan simulasi kebencanaan, jalur evakuasi dan penggunaan peralatan komunikasi dan informasi kebencanaan
Peningkatan kapasitas pemulihan dini dalam merehabilitasi korban bencana pada kondisi pasca bencana	Meningkatnya kapasitas pemulihan dini dalam rangka rehabilitasi korban bencana pada kondisi pasca bencana	Meningkatkan fasilitas pemulihan pasca bencana	Fasilitas pemulihan dan merehabilitasi korban bencana pada pasca bencana